

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 5

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 6

1.3.1. Maksud Penelitian..... 6

1.3.2. Tujuan Penelitian 8

1.4. Kegunaan Penelitian 9

1.5. Kerangka Pemikiran 10

1.6. Jenis dan Metode Penelitian 15

1.7. Lokasi Penelitian..... 17

1.8. Sistematika Penulisan 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 21

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana..... 21

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana 21

2.1.2. Unsur- unsur Tindak Pidana 23

2.2. Tinjauan Umum Mengenai <i>Cyber Crime Phishing</i>	28
2.2.1. Pengertian <i>Cyber Crime</i>	28
2.2.2. Pengertian <i>Cyber Crime Phishing</i>	32
2.2.3. Metode dan Tehnik Serangan <i>Phishing</i>	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
3.1. Hasil Penelitian	46
3.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Pangandaran	46
3.1.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Phishing</i> Dihubungkan Dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangandaran	50
3.1.3. Kendala- kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Phishing</i> Dihubungkan Dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor	

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangandaran.....	55
3.1.4. Upaya-upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Phishing</i> Dihubungkan Dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangandaran	57
3.2. Pembahasan	60
3.2.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Phishing</i> Dihubungkan Dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia	

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangandaran	60
3.2.2. Kendala- kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Phishing</i> Dihubungkan Dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangandaran.....	64
3.2.3. Upaya- upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Phishing</i> Dihubungkan Dengan Pasal 30 Ayat (2) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pangandaran.....	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP